

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi politik perlu dilakukan untuk terus menjaga hubungan baik kepada masyarakat, memberikan informasi tentang program serta visi dan misi mereka, komunikasi politik ini tentu dimanfaatkan agar dapat memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik seperti memilih, mengikuti kampanye, bahkan terlibat aktif dengan partai politik. Strategi komunikasi politik ini di bangun partai politik untuk memenangkan pemilihan, membangun citra positif, mempromosikan kebijakan, mendapatkan dukungan publik, dan mengembangkan basis anggota partai politik. Selain itu, komunikasi politik juga merujuk pada pertukaran informasi antara pelaku politik dan masyarakat untuk membentuk opini, memengaruhi sikap, dan mencapai tujuan politik. Dalam gambaran komunikasi politik saat ini, media massa memainkan peranan sentral sebagai sarana penyebaran pesan politik. Aktifitas politik seperti debat publik, pidato politik merupakan contoh bentuk komunikasi politik secara intens. Maka dari itu, pemahaman mendalam tentang audiens, situasi politik, dan perubahan sosial menjadi kunci sukses dalam komunikasi politik yang efektif. Komunikasi yang baik tidak hanya mampu menyampaikan pesan dengan jelas, tetapi juga mampu membuka ruang dialog dan partisipasi publik dalam proses politik (Hasan, 2016).

Komunikasi politik perlu juga adanya hubungan baik dari para kader yang terdapat di dalam partai tersebut, tentunya agar komunikasi politik berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dengan demikian komunikasi politik mesti dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal partai. Menurut Ramlan Surbakti komunikasi politik sebagai proses untuk memberikan informasi politik, oleh pemerintah kepada masyarakat ataupun sebaliknya. Komunikasi politik tersebut mestinya dijalankan oleh seluruh partai politik yaitu bagi seluruh anggota yang berpartisipasi aktif di dalam organisasi maupun yang bertugas sebagai komunikator yang menyampaikan informasi atau pesan politik.

Banyaknya aspek-aspek perubahan yang tercipta pasca reformasi di Indonesia, itu terjadi pada aspek politik, hukum, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Inimengjadi perubahan kekuatan politik semenjak terjadinya pergeseran struktur dari pusat maupun daerah, yang diharapkan terdapat pembaharuan yang berdampak pada sistem politik yang lebih demokratis untuk menciptakan kestabilan politik yang dinamis (Adquisiciones et al., 2019).

Komunikasi politik menjadi kekuatan politik yang sangat penting pada era reformasi saat ini. Semakin dibangunnya demokratisasi, desentralisasi, serta pemilihan umum secara langsung pada tingkat pusat maupun daerah ini menjadikan betapa pentingnya komunikasi politik di Indonesia. Komunikasi politik pada teorinya memang memiliki keberlakuan secara umum, namun pada praktiknya, komunikasi politik tentu memiliki perbedaan yang terjadi karena adanya perbedaan budaya dan adat istiadat pada setiap organisasi, hakikatnya komunikasi politik diengaruhi pada sistem politik dan budaya itu sendiri (Setiadi, 2020).

Strategi komunikasi politik adalah sebuah analisis, perencanaan, implementasi dan menjadi kontrol politik. Program pilihan yang menjadi rancangan dibuat agar menciptakan, membangun, dan memelihara relasi antara partai dan pemilih dengan tujuan yang menguntungkan. Tentunya strategi pemasaran politik ini penting untuk dilakukan oleh para aktor dan kader politik yang akan maju pada pemilihan umum, karena keberhasilan dalam menjalankan fungsi komunikasi politik adalah seberapa banyak kader partai politik mendapatkan perolehan suara pemilih. Selain hal tersebut berfungsinya komunikasi politik berdampak pada elektabilitas partai politik sehingga mampu bersaing pada era demokrasi yang semakin kompetitif. (Syarbaini et al., 2021)

Sebagai wujud demokrasi diperlukan jembatan antara pemerintah dan rakyat dengan adanya partai politik. Dengan demikian sistem demokrasi bisa berjalan secara teratur. Tugas partai politik dalam hal ini untuk menampung dan menata aspirasi dari masyarakat untuk menciptakan opini publik yang sistematis dan menjadikan sebuah kebijakan yang teratur. Di Indonesia jumlah pemilih sangat besar dan

beragam kepentingan, maka perlu pengelolaan yang baik untuk dijadikan keputusan. Dalam hal ini peranan besar dimiliki oleh partai politik sebagai proses seleksi pejabat dan juga substansi kebijakan. Partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela, dengan tujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka dalam hal ini bertekad dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tegak lurus dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik).

Partai politik pada hal ini menjadi sebuah anugerah dalam kehidupan demokratis, sebagai struktur partai politik yang ideal, tujuannya adalah menggerakkan dan mewadahi warga negara untuk mewakili kepentingan yang harus diperjuangkan, mencari jalan tengah bagi pendapat yang berseberangan, dan menyediakan mekanisme yang sah dan damai untuk suksesi kepemimpinan politik. Melihat adanya partai politik ini menandakan suatu bentuk kebebasan dari hak asasi manusia, hal ini dimaksudkan sebagai kebebasan berserikat serta hidup berorganisasi. Karena itu, kebebasan berserikat ini diakui secara menyeluruh yang dikenal sebagai *freedom of association* (Amal et al., n.d.).

Fungsi dari partai politik untuk negara menjadikan pemerintahan yang efektif dalam menjaga fungsi dari demokrasi dan stabilitas negara. Sedangkan fungsi partai politik untuk warga negara mereka menyediakan platform untuk menyampaikan ideologi, pandangan, serta sebagai wadah untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dalam proses politik dan memastikan rasa aman dengan mengkoordinasikan konflik politik melalui proses yang demokratis. Peran yang krusial ini menjadikan partai politik sebagai wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Selain dari pada hal tersebut partai politik juga memiliki fungsi sebagai jenis organisasi tunggal yang bersaing untuk membentuk kabinet pemerintahan (Basuki, 2020).

Partai Politik bertindak sebagai penengah antara pemerintah dan masyarakat, menghubungkan kebutuhan rakyat dengan pembuatan kebijakan. Selain itu, partai politik memiliki peran dalam pembentukan

kepemimpinan dan struktur pemerintahan. Mereka mencalonkan kandidat untuk posisi politik dan membentuk pemerintahan ketika memenangkan pemilu. Fungsi kontrol dan keseimbangan juga melekat pada partai politik, memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan akuntabilitas dan transparansi. Partai politik juga menjadi alat bagi warga negara untuk meyalurkan kepentingan bersama dan memperjuangkan hak – hak mereka. Dengan membentuk kelompok kepentingan, partai politik mampu menjadi wakil bagi beragam segmen masyarakat. Partai politik tidak hanya menjadi aktor utama dalam sistem politik, tetapi juga perekat sosial yang memfasilitasi partisipasi demokratis dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara (Kadir, 2014).

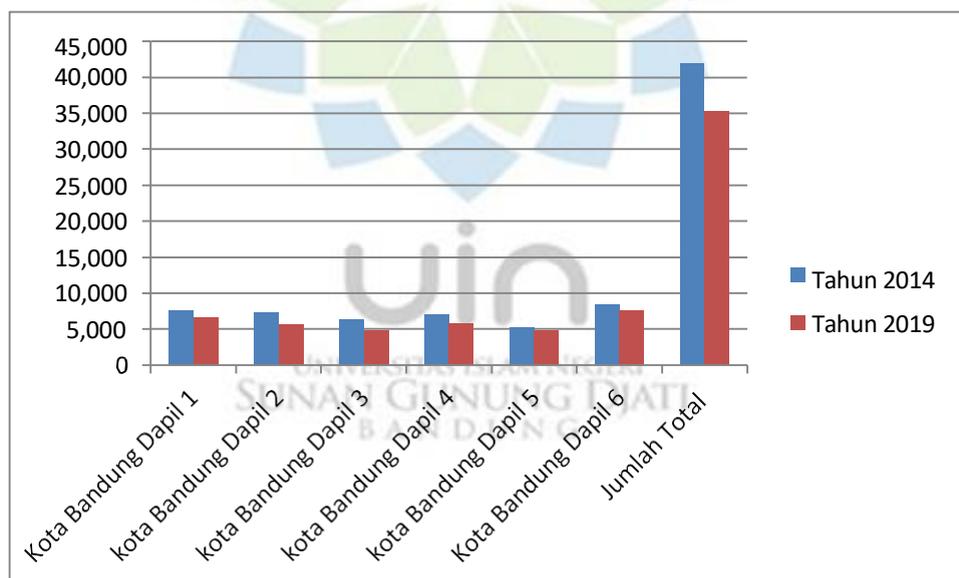
Partai Demokrat didirikan pada tanggal 9 september 2001 oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), partai ini dibentuk setelah SBY mundur dari militer dan memasuki dunia politik. Pada pemilu 2004, Partai Demokrat berhasil meraih sukses besar dengan SBY sebagai calon presiden dan memenangkan pemilu. SBY menjabat sebagai presiden Indonesia selama 2 periode, yaitu 2004-2009 dan 2009-2014. Partai Demokrat juga berperan penting dalam koalisi pemerintah selama masa pemerintahan SBY. Namun, seiring berjalan waktu partai menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam dunia politik indonesia. Pada tahun berikutnya, partai ini tidak lagi memainkan peran sentral dalam politik indonesia seperti pada masa pemerintahan SBY (Dewi, 2013).

Partai Demokrat Kota Bandung telah mengalami pasang surut yang menarik perjalanan eksistensinya sepanjang pemilu legislatif. Partai ini telah menjadi salah satu kekuatan politik yang signifikan di Indonesia. Namun, di tingkat lokal, khususnya di Kota Bandung, perjalanan partai ini sering kali dipengaruhi dinamika politik yang kompleks. Pada awal kemunculannya Partai Demokrat mendapatkan dukungan yang cukup kuat di Kota Bandung. Kepemimpinan yang diakui dan agenda reformasi yang diusung berhasil memikat sebagian besar pemilih. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan muncul dalam bentuk perubahan dinamika politik, polarisasi opini publik, dan persaingan antarpartai yang semakin ketat. Dalam pemilihan umum beberapa tahun terakhir, Partai Demokrat di Kota Bandung harus menghadapi pertarungan politik yang semakin sengit.

Perubahan preferensi pemilih, terutama generasi muda yang semakin kritis, menjadi faktor kunci yang mempengaruhi eksistensi partai ini. Meskipun partai memiliki basis pendukung setia, tetapi tantangan internal dan pergeseran ideologis juga berkontribusi pada eksistensi Partai Demokrat Kota Bandung. Pengambilan keputusan internal yang tidak selalu konsisten dan terkadang kontroversial dapat mempengaruhi dan merugikan citra partai di mata pemilih. Namun, Partai Demokrat tidak bisa diabaikan begitu saja. Kehadirannya masih terasa dan memiliki potensi untuk bangkit kembali. Upaya restrukturisasi dan komunikasi politik yang efektif dapat menjadi kunci untuk mengatasi pasang surut tersebut. Pemilu legislatif akan mejadi ujian kritis bagi Partai Demokrat untuk memperkuat kembali eksistensinya di tingkat local (Ina & Urillo, 2005).

Tabel 1. 1

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat Kota Bandung 2014 & 2019



(sumber: KPU Kota Bandung)

Pada pemilihan umum legislatif tahun 2019, Partai Demokrat mendapatkan 35.288 suara dari enam daerah pilihan di Kota Bandung. Hasil perolehan suara tersebut dapat dikatakan menurun apabila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada tahun 2014 yang bisa mencapai 41.934 suara dari jumlah daerah pilihan yang sama di Kota Bandung. Pada hasil penurunan suara yang diperoleh Partai Demokrat ini

berpengaruh pada citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat Kota Bandung.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dapat dilakukan dengan *Involvement* (keterlibatan hal lain), peran komunikasi politik efektif untuk membangun citra partai, ini bisa melibatkan berbagai platform seperti media sosial, diskusi kelompok, atau kampanye politik untuk mempengaruhi pemikiran dan sikap publik, seperti upaya propaganda politik merupakan rancangan untuk menyampaikan informasi dengan tujuan mempengaruhi opini publik terhadap stigma negatif di masyarakat maupun suatu isu atau tokoh politik Partai Demokrat, dengan ini diharapkan dapat mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan loyalitas dari pendukung Partai Demokrat pada pemilihan umum legislatif. (Ina & Urillo, 2005).

Perlu adanya perhatian penting untuk sistem kaderisasi partai secara sistematis mulai dari tingkat bawah hingga tingkat pusat sehingga mengoptimalkan segala kekuatan yang dimiliki Partai Demokrat mampu menciptakan kader unggulan dapat menjadi representasi yang baik atas nilai dan program partai, mereka dapat membantu dalam menyampaikan komunikasi politik partai secara efektif kepada masyarakat dan membangun hubungan kuat partai dengan pemilih serta tidak hanya mengandalkan figur sentral. mampu mengembalikan kepercayaan publik serta dapat meningkatkan elektabilitas partai di tingkat daerah maupun pusat. Pemilihan umum legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2019 di Kota Bandung banyaknya partai politik yang berpartisipasi, hal ini menjadikan ketatnya persaingan perebutan suara pemilih antar partai politik, keseluruhan pada pemilihan umum legislatif di Kota Bandung saat itu terdapat 20 partai politik. Partai Demokrat adalah salah satu partai yang ikut meramaikan kontestasi pada pemilihan umum legislatif 2019-2024. Dengan berpartisipasinya Partai Demokrat pada pemilihan umum legislatif 2019 itu menjadi ajang untuk melihat seberapa efektif komunikasi politik yang berkaitan dengan pesan politik menurut Dan Nimmo melalui retorika politik, iklan politik, dan propaganda politik yang dijalankan oleh Partai Demokrat Kota Bandung.

Dalam komunikasi politik yang dijalankan oleh Partai Demokrat Kota Bandung masih terdapat kendala sehingga belum bisa dilaksanakan secara efektif, karena Partai Demokrat sebagai partai besar masih banyak hambatan yang terdapat dari dalam maupun luar partai dalam melakukan fungsi komunikasi politik, misalnya terdapat miskomunikasi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kota Bandung dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) dalam penyampaian program kerja maupun kegiatan, ini disebabkan karena tingkat pendidikan dan pengetahuan politik para kader Partai Demokrat Kota Bandung masih rendah. Selain itu, kurangnya inovasi dalam penyampaian pesan dan informasi partai ini menyebabkan kejenuhan pada pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada publik, sehingga menghambat komunikasi politik yang dijalankan sehingga kurang membangun hubungan yang kuat antara partai dan masyarakat atau pemilih (Dewi, 2018).

Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kota Bandung periode 2019-2024 Partai Demokrat memberikan target awal untuk memenangkan 12 kursi, namun yang pada hasil yang dicapai hanya berjumlah 5 kursi, hasil ini dapat dikatakan anjloknya perolehan kursi karena pada pemilihan umum legislatif di Kota Bandung periode 2014-2019 Partai Demokrat berhasil memenangkan 6 kursi, bahkan pada pemilihan umum legislatif periode 2009-2014, Partai Demokrat berhasil menempatkan 20 legislator di Kota Bandung, ini menunjukkan kegagalan Partai Demokrat untuk mencapai target awal bahkan mengalami penurunan dari pemilihan umum legislatif sebelumnya. Berikut adalah jumlah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Demokrat pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat:

Tabel 1. 2

Tabel Perolehan Kursi Partai Demokrat

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kursi
1	Kota Bandung	5 kursi
2	Kota Bogor	5 kursi
3	Kota Bekasi	5 kursi
4	Kota Depok	3 kursi
5	Kota Banjar	2 kursi
6	Kota Cirebon	2 kursi
7	Kota Cimahi	6 kursi
8	Kota Sukabumi	5 kursi
9	Kota Tasikmalaya	6 kursi
10	Kota Subang	2 kursi
11	Kabupaten Bogor	6 kursi
12	Kabupaten Sukabumi	5 kursi
13	Kabupaten Bandung	5 kursi
14	Kabupaten Cianjur	5 kursi
15	Kabupaten Garut	5 kursi
16	Kabupaten Tasikmalaya	5 kursi
17	Kabupaten Subang	2 kursi
18	Kabupaten Ciamis	6 kursi
19	Kabupaten Kuningan	5 kursi
20	Kabupaten Majalengka	2 kursi
21	Kabupaten Cirebon	5 kursi
22	Kabupaten Sumedang	2 kursi
23	Kabupaten Indramayu	3 kursi
24	Kabupaten Karawang	9 kursi
25	Kabupaten Bekasi	6 kursi
26	Kabupaten Bandung Barat	5 kursi
27	Kabupaten Purwakarta	3 kursi

(Sumber : Hasil Rekap Berita disetiap Kabupaten/Kota Oleh Peneliti 2023)

Melihat hasil yang perolehan kursi Partai demokrat pada pemilihan umum legislatif 2019 di Jawa Barat bahwasanya terdapat ketidaksesuaian hasil yang sudah menjadi target awal 12 kursi partai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung. Jika melihat hasil yang tidak mencapai target di awal, tentu ini cukup mengecewakan terlebih apa yang

sudah dilakukan dan dikoaar koarkan di media Partai Demokrat Kota Bandung begitu penuh percaya diri dapat memperoleh 12 kursi DPRD, dengan begitu hal ini berkaitan dengan komunikasi politik yang digunakan Partai Demokrat Kota Bandung sehingga gagal dalam memenuhi target awal yang sudah ditetapkan.

Partai Demokrat Kota Bandung yang hanya berhasil meraih 5 kursi pada pemilihan umum legislatif di Kota Bandung hasil tersebut sama seperti yang diperoleh Partai Demokrat di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Namun ada yang mendapat perolehan suara lebih rendah di bawah dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Jika melihat kota terdekat dari Kota Bandung ada Kota Cimahi yang memperoleh 6 kursi, dari hasil tersebut terlihat perolehan kursi tersebut lebih baik dari yang dicapai Partai Demokrat Kota Bandung. Pelaksanaan retorika menerapkan pola penyesuaian diksi kepada masyarakat, iklan pada kampanye politik yang dilakukan Partai Demokrat menarik dengan menyapa warga *door to door* dan mulai aktif bersosial media untuk menyampaikan pesan politiknya, propaganda yang dilakukan pertemuan dengan warga dan diskusi terkait gagasan yang diusung Partai Demokrat bersama masyarakat. Kedua, terdapat faktor penghambat yang dilakukan yaitu retorika kualitas yang tidak merata dari setiap kader maupun calon anggota legislatif Partai Demokrat, iklan politik hanya melakukannya di wilayah yang terdapat basis masa Partai Demokrat dan tidak menyeluruh, kemudian minim inovasi melakukan kampanye yang lebih menarik dan media massa Partai Demokrat memang belum terlalu optimal digunakan di masa kampanye, propaganda masih dirasa kurang maksimal karena program yang disampaikan terlalu umum sehingga kurangnya antusiasme dari masyarakat.

Menganalisa bagaimana Partai Demokrat terdapat ketidakefektifan dalam meyakinkan masyarakat Kota Bandung memilih partai Demokrat ini hasil dari kurang berpengaruhnya faktor pesan komunikasi politik yang dilakukan. Pertama retorika politik, utamanya dalam teknik komunikasi politik ini menjadi seni berbahasa, artinya strategi komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi opini dan perilaku pemilih di Kota

Bandung cenderung kurang terpenuhi menjadikan pada pemilihan umum legislatif perolehan kursi Partai Demokrat tidak sesuai apa yang menjadi ketetapan awal. Kedua iklan politik, Partai demokrat dirasa kurang efektif dalam menjangkau seluruh elemen masyarakat menyebabkan ketidaktahuan dan kurangnya apresiasi sehingga kurang tergeraknya elemen masyarakat khususnya kaum milenial terhadap ajakan dan seruan yang dilakukan Partai Demokrat. Serta terakhir propaganda politik, minimnya upaya yang dilakukan dalam memberikan informasi dalam mempromosikan agenda politik untuk mempengaruhi pendapat dan sikap untuk memilih Partai Demokrat, kurangnya aspek propaganda sehingga membuat masyarakat Kota Bandung tidak memilih.

Maka dengan keterwakilan Partai Demokrat pada pemilihan umum 2019 di Kota Bandung diharapkan terdapat suara untuk mewakili dan memberikan usulan pokok gagasan ide dalam membuat suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karna semakin banyak keterwakilan dari kader Partai Demokrat yang terpilih ini menjadi kekuatan di dalam agar dapat memberikan dan mengusulkan sebuah produk kebijakan publik. Maka adanya keterkaitan bagaimana partai Demokrat melakukan komunikasi politik sehingga menarik minat bagi pemilih karena dengan banyak keterwakilan dari partai akan memberi dampak pada hasil kebijakan yang dibuat untuk mewakili suara masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Partai Demokrat Kota Bandung pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 sudah menggunakan komunikasi politik dengan menekankan dimensi pesan komunikasi politik retorika, iklan, dan propaganda politik. Namun demikian, perolehan suara Partai Demokrat Kota Bandung pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 tidak sesuai dengan target awal. Berdasarkan itu, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Retorika, Iklan, dan Propaganda politik dilaksanakan dalam komunikasi politik Partai Demokrat Kota Bandung pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 ?
2. Bagaimana faktor penghambat retorika, iklan, dan propaganda politik

dalam komunikasi politik Partai Demokrat Kota Bandung pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui Retorika, Iklan, dan Propaganda politik dilaksanakan dalam komunikasi politik Partai Demokrat Kota Bandung pada Pemilihan Umum Legislatif 2019.
2. Untuk Mengetahui faktor penghambat retorika, iklan, dan propaganda politik dalam komunikasi politik Partai Demokrat Kota Bandung pada Pemilihan Umum Legislatif 2019.

1. Manfaat Hasil Penelitian

Sebagaimana dengan adanya Rumusan masalah, Tujuan peneliti juga menghadirkan beberapa point manfaat dari penelitian yang sudah dibuat. Diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Pada manfaat teoritis peneliti berharap kajian yang dibuat bisa menjadi bahan yang nantinya akan digunakan untuk membuat kajian yang lebih baru dan lebih sempurna mengenai strategi komunikasi politik. Sehingga nantinya akan menjadi motivasi bagi siapa saja yang hendak akan membuat bahan kajian dengan pembahasan yang serupa.

b. Manfaat Praktis

i. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan peneliti tentang strategi komunikasi politik. Selain itu peneliti berusaha membandingkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian teori dengan praktik yang terjadi di lapangan.

ii. Bagi Kader Partai Demokrat Kota Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada kader partai Demokrat untuk terus memacu bentuk militansi agar dapat menjadikan contoh dari pada kader Demokrat lainnya.

iii. Bagi Partai Demokrat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk pertimbangan partai Demokrat Kota Bandung terus meningkatkan komunikasi politik supaya kedepan pergerakan Partai Demokrat lebih massif.

iv. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sebagai bandingan untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian berikutnya.

v. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan membuat masyarakat Kota Bandung mengetahui dan memahami pentingnya strategi komunikasi politik yang dilakukan setiap partai politik khususnya partai Demokrat.

2. Kerangka Berpikir

Dari hasil tinjauan peneliti, komunikasi politik Partai Demokrat pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kota Bandung dapat diuraikan mengenai maksud dari penelitian ini bagaimana menggambarkan suatu faktor tujuan yang menjadi ketetapan/target dengan hasil yang tercapai. Terdapat faktor yang menjadi perolehan kursi Partai Demokrat pada pemilihan umum legislatif berupa pesan komunikasi politik, apabila yang menjadi faktor tersebut tidak berpengaruh pada pemilih maka hasil yang ingin dicapai tidak sesuai dengan tujuan awal yang menjadikan pemilihan umum legislatif tidak mencapai target awal. Komunikasi politik menjadi sangat penting untuk keberhasilan partai politik dalam memperoleh kursi, keberhasilan tersebut harus menggunakan komunikasi politik yang tepat supaya memberi dampak signifikan pada capaian perolehan kursi pada pemilihan umum legislatif periode 2019-2024.

Pada pembahasan permasalahan diatas, dimensi pesan politik penting untuk di penuhi Partai Demokrat Kota Bandung untuk mendominasi suara pemilih pada pemilihan umum legislatif, pada pesan politik tersebut sangatlah berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan karna saling mempengaruhi satu sama lain, dan itulah dapat menjadi hasil penentu keberhasilan dari pada komunikasi politik Partai Demokrat. Tentunya harus adanya keterkaitan dari pesan politik

tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal pada pemilihan umum legislatif di Kota Bandung.

Pertama dalam aspek retorika politik, ini mejadi bagian penting dalam menjalankan strategi komunikasi politik Partai Demokrat, ini Merupakan seni berbahasa, artinya apabila kader Partai Demokrat memiliki seni dalam berbicara tentu dapat di maksimalkan untuk mempengaruhi opini dan perilaku pemilih di Kota Bandung agar mau memberikan hak suara penuh.

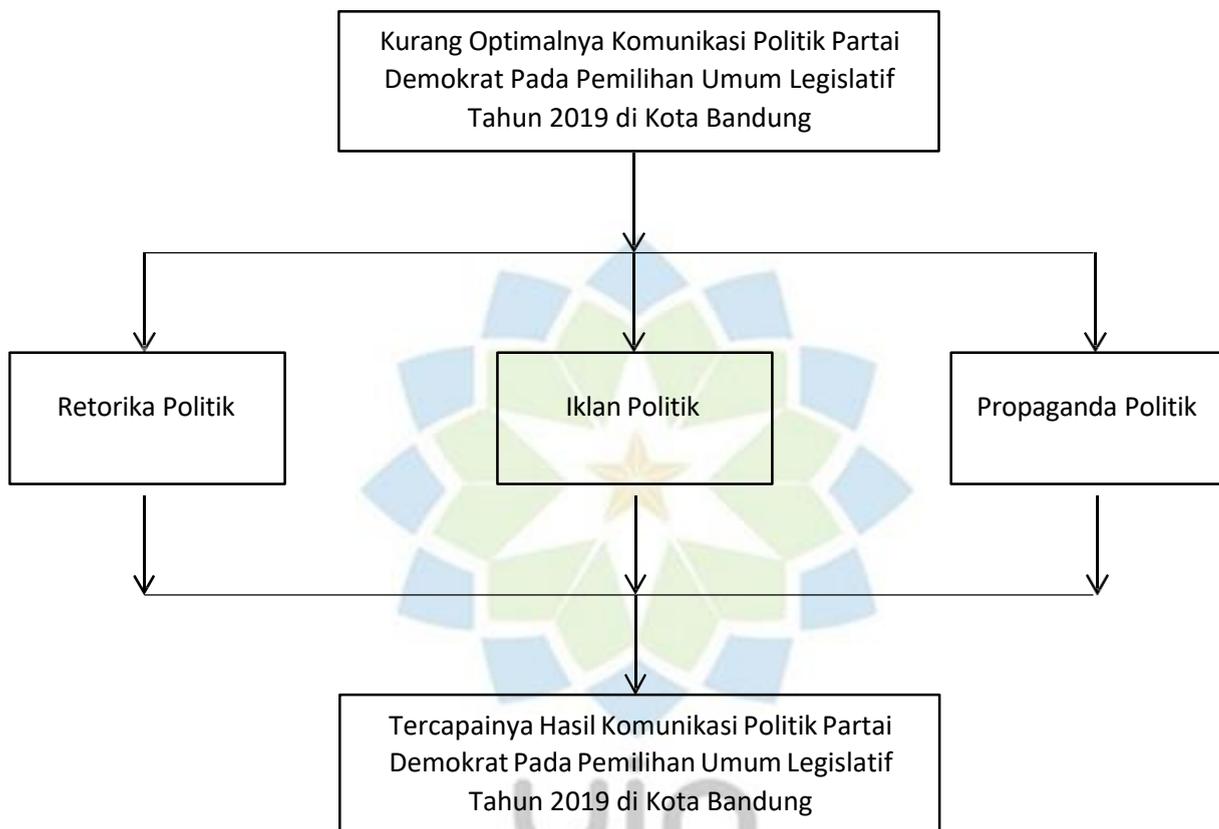
Kedua dalam aspek iklan politik, hal ini menjadi suatu kegiatan yang pasti dilakukan partai politik namun diperlukan pengemasan yang menarik sehingga mendapat atensi lebih dari masyarakat, ini merupakan cara ampuh untuk menarik daya jual kepada masyarakat, agar jangkauan menjadi lebih luas perlu juga menggunakan media massa karna lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan politik baik dari kalangan atas hingga kalangan bawah mengetahui apa yang ingin disampaikan sehingga menambah rasa ingin memberi hak suara pada partai tersebut.

Ketiga dalam aspek propaganda politik, ini merupakan rancangan untuk menyampaikan informasi untuk mempengaruhi sekelompok orang yang melihat dan mendengarnya. Tentu pada pesan politik ini dapat meningkatkan loyalitas dari pendukung Partai Demokrat Kota Bandung pada pemilihan umum legislatif.

Maka dengan merujuk pada penjelasan di atas, maka membentuk konsep dasar yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah komunikasi politik partai demokrat pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kota Bandung ditinjau melalui retorika politik, iklan politik, propaganda politik.

Sesuai uraian tersebut, berikut sebagai bentuk kerangka penelitian:

Tabel 1. 3
Kerangka Penelitian



3. Hasil Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu telah mengangkat tema komunikasi politik partai. Namun demikian, masih jarang yang memiliki fokus kajian pada aspek dimensi pesan komunikasi politik. Di antaranya penelitian itu adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Susanto 2018 dengan judul “Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum” Kebebasan dalam berkomunikasi yang mewarnai kehidupan politik, berdampak terhadap tuntutan demokratisasi bernegara yang faktual melalui pemilihan umum yang berkeadilan dan menghasilkan anggota legislatif yang

berpihak kepada rakyat. Penelitian tentang dinamika komunikasi politik dan Pemilihan Umum bertujuan untuk memberi gambaran tentang dinamika komunikasi politik dalam rangka menghadapi pemilihan umum. Temuan penelitian mencakup, keberadaan para komunikator politik yang terdiri dari elite parpol dan calon anggota legislatif, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara, dan kualitas anggota legislatif hasil pemilihan umum. Ketiga temuan tersebut merupakan faktor mendasar pendukung keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang menghasilkan anggota legislatif berkualitas. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang dititikberatkan pada penelusuran data yang berkaitan dengan pemilu legislatif.

Penelitian ini memiliki kesamaan pada dinamika pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Kota Bandung dalam hal ini dinamika komunikasi yang berimplikasi pada ketatnya persaingan antar partai politik dalam perebutan suara pemilih, terdapat keterkaitan dengan dinamika Partai Demokrat dalam menjalankan komunikasi politiknya yang ideal dan efektif untuk menarik minat pemilih karena dengan banyaknya keterwakilan dari partai akan memberikan dampak yang sedikit banyak terhadap kebijakan yang akan dibuat nantinya. Penelitian ini menggunakan variabel keberhasilan dimensi pesan komunikasi politik dapat ditentukan oleh retorika politik, Iklan politik, propaganda politik. Metode penelitian sama digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif. Namun data yang ditelusuri berbeda terfokus pada dimensi pesan komunikasi politik yang menggambarkan hasil pilihan umum legislatif dan faktor yang menjadi penghambat pada Partai Demokrat Kota Bandung.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Riyadh 2023 dengan judul “Strategi Komunikasi Politik DPD Partai Golkar Dalam Membangun *Branding Image* Golkar Bangkit di Kabupaten Kampar” Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Komunikasi Politik DPD Partai Golkar dalam Membangun Brand Image Golkar Bangkit di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data wawancara memilih 5 orang sebagai sampel yakni Ketua DPD Partai Golkar Kampar, Ketua Badan

Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) Partai Golkar Kampar , Ketua PK Golkar Kecamatan Kuok, Caleg yang terpilih menjadi Anggota DPRD Kampar dan Pengamat Politik/ akademisi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Komunikasi Politik DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar dalam Membangun Brand Image Golkar Bangkit di Kabupaten Kampar yaitu dengan melakukan pertemuan secara langsung ke kemasyarakatan dan melaksanakan kegiatan sosial ke masyarakat serta memberi bantuan ke masyarakat ketika ada musibah yang bersifat insidental. Disamping itu adanya pencitraan dan membangun Brand Image positif partai Menggunakan alat atau media komunikasi politik seperti Media cetak dan Media Sosial. Diharapkan dengan adanya brand image Golkar Bangkit ini bisa menunjang proses Komunikasi Politik dalam melakukan kampanye politik serta terbantunya masyarakat dalam kegiatan sosial yang dilakukan.

Jika dilihat study kasus diatas, penelitian ini juga berfokus pada permasalahan komunikasi politik yang dijalankan Partai Demokrat tingkat daerah di Kota Bandung, dengan tujuan untuk menarik minat pemilih dengan membangun branding partai. Tetapi dengan landasan teori yang berbeda yang mana penelitian terdahulu fokus pada branding partai dan penelitian ini fokus pada aspek dimensi pesan komunikasi politik yang dijalankan. Pada penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara yang melibatkan aktor politik dan masyarakat. Hasil yang membedakan dalam penelitian ini menunjukan data yang menggambarkan dimensi komunikasi politik yang dijalankan dan faktor penghambatnya.

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Satrio 2019 dengan judul “Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Memobilisasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Daerah Kota Semarang Tahun 2019” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik suatu partai, khususnya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) di kota Semarang. Pada Pemilu Legislatif 2014 ini di Kota Semarang beberapa fenomena unik terkait PDI-Perjuangan. Kota Semarang memiliki kepala pemerintahan dari

partai PDI- Perjuangan tetapi tidak mampu menang di tahun 2009 kini berhasil menang dengan perolehan cukup tinggi. PDI-Perjuangan yang sebelumnya cukup besar perolehannya di tahun 2004 merosot di tahun 2009 dan kini di tahun 2014 mereka berhasil menang mutlak. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang berhubungan dengan strategi komunikasi politik PDI- Perjuangan di Kota Semarang untuk memobilisasi pemilih di tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik dari Maswadi Rauf yaitu suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan seperangkat simbol-simbol yang berarti yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dalam pengumpulan data wawancara dilakukan pada Fungsiaris partai PDI-Perjuangan Kota Semarang, Anggota Legislatif PDI-Perjuangan Kota Semarang, Partisipan PDI-Perjuangan Kota Semarang. Hasil Penelitian ini adalah : (1) Strategi komunikasi politik PDI-Perjuangan menggunakan strategi atau metode tatap muka atau face to face (2) aktor-aktor yang berperan penting adalah Ketua DPC PDI-Perjuangan, Fungsiaris dan kader partai, calon anggota legislatif, dan team sukses dari para calon anggota legislatif. (3) faktor pendukung adalah mesin partai, nama besar partai, sejarah sosial politik masyarakat Kota Semarang, Efek perilaku kader kedaerahan Kota Semarang, Jokowi Efek. (4) Faktor hambatannya adalah terbatasnya sarana - prasarana, tingkat apatis politik yang tinggi masyarakat Kota Semarang. Dalam melakukan strategi komunikasi politik PDI-Perjuangan cukup baik, namun di beberapa sektor masih perlu ditingkatkan yaitu dalam penyampaian pola komunikasi.

Pada penelitian terdahulu diatas, memiliki persamaan permasalahan kasus pada perolehan kursi legislatif, namun terdapat perbedaan karena penelitian terdahulu tersebut kasusnya PDIP mengalami peningkatan perolehan kursi legislatif secara signifikan, tetapi penelitian ini kasusnya Partai Demokrat mengalami penurunan perolehan kursi legislatif yang

signifikan. Tetapi tujuannya sama untuk mengetahui komunikasi politik yang dijalankan partai, dalam penelitian ini menggunakan landasan teori yang berbeda namun metode yang digunakan sama yaitu wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian yang ditunjukkan memiliki kesamaan dari faktor komunikasi yang diterapkan partai dan faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan komunikasi politik.

Keempat, penelitian yang dilaksanakan oleh Istitania 2019 dengan judul “ Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrat Jawa Timur Dalam Meraih Dukungan Suara Pada Pileg 2019” Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi politik Partai Demokrat Jawa Timur dalam meraih dukungan suara di pemilihan umum legislatif (pileg) 2019. Penelitian ini penting dilakukan karena pileg 2019 telah membuat sejarah baru dalam demokrasi Indonesia. Pasalnya, pileg 2019 membawa kebaruan pada waktu pelaksanaan dan metode hitung suara. Strategi komunikasi politik kemudian menjadi elemen penting yang memiliki pengaruh terhadap perolehan suara partai. Partai Demokrat adalah partai yang secara gamblang menyatakan dirinya lebih memprioritaskan pileg dibanding pilpres.

Peneliti memilih DPD Partai Demokrat Jatim sebagai objek penelitian, karena pertimbangan figur ketua umum dan Jawa Timur merupakan penyumbang pemilih terbesar kedua di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik penelitian data wawancara mendalam (indepth interview) dan studi literatur. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi yang disusun oleh DPD Partai Demokrat Jatim teridri atas tiga hal yaitu strategi ketokohan, ideologi & historis, serta 14 prioritas Demokrat. Kemudian disusun implementasi dengan tema besar meet the people. DPD Partai Demokrat Jawa Timur sebagai komunikator politik kemudian memobilisasi caleg untuk mendukung proses implementasi strategi. Oleh karenanya, DPD Partai Demokrat Jawa Timur memiliki kebijakan untuk melakukan fit and proper test dalam memilih caleg-caleg yang berkualitas. Proses penyusunan strategi dan rekrutmen caleg dilakukan dengan bantuan konsultan politik. Pesan politik ”Coblos Partai Nomor 14“ serta “Pilihlah Caleg yang Baik dan Punya Program Nyata” dipilih untuk disampaikan kepada masyarakat

Jawa Timur. Selanjutnya, implementasi strategi dilakukan melalui dua media yaitu, below the line medium dan above the line medium.

Pada penelitian terdahulu diatas yang membedakan peneletian ini adalah pada subjek yang menjadi fokus penelitian karena penelitian sebelumnya berfokus pada strategi yang dilakukan partai politik pada pemenangan pemilu melalui figur ketua umum yang ada di Jawa Timur. Sedangkan penelitian ini menjadikan komunikasi politik sebagai objek utama penelitian dan menggunakan perspektif teori yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Memiliki kesamaan pendekatan kualitatif deskriptif dan study litelatur. Hasilnya memiliki fokus yang berbeda walau sama dalam konteks pemilihan umum legislatif.

Kelima, penelitian yang dilaksanakan oleh Dewi 2018 jurnal dengan judul “ Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik Partai Demokrat ” Partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat melaksanakan fungsi-fungsi partai politik salah satunya adalah komunikasi politik. Partai Demokrat sebagai salah satu partai politik yang ada di Indonesia melaksanakan fungsi komunikasi politik. Namun dalam pelaksanaannya komunikasi politik di Partai Demokrat mengalami hambatan salah satunya miskomunikasi. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah karena anggota partai sebagai komunikan harus mampu memahami dan mengerti benar apa yang disampaikan oleh pimpinan sebagai komunikator. Dari penelitian ini dapat dikatakan pelaksanaan komunikasi politik di DPC Partai Demokrat Kota Bandung pada pemilihan Walikota Bandung terdiri dari unsur- unsur yang membentuknya, yaitu: komunikator, komunikan, pesan, saluran, dan feed back. Partai Demokrat sebagai partai politik yang tergolong besar, dimana didukung oleh kader partai yang cukup banyak. Sedangkan faktor penghambatnya adalah anggota partai yang kualitasnya masih rendah. Hal ini membutuhkan pendidikan politik yang diadakan dengan jadwal tersendiri secara khusus tidak hanya dimasukkan dalam salah satu agenda rapat anggota.

Pada penelitian ini mencoba menganalisa permasalahan yang sama pada penelitian terdahulu mengenai komunikasi politik Partai Demokrat di Kota Bandung namun dalam kasus yang berbeda pemilihan umum legislatif 2019, landasan teori yang digunakan juga memiliki fokus berbeda

dengan pendekatan metode kualitatif data yang mengambil sampel dari wawancara dan observasi lapangan. Dari penelitian terdahulu diatas memiliki hasil yang berbeda karena tidak memiliki fokus penelitian yang sama, namun pada penelitian tersebut bisa menjadi acuan dan data tambahan sebagai penguat penelitian ini.

Penelitian ini melibatkan penggunaan perspektif berbeda untuk memperkaya pemahaman dan mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif. Perspektif berbeda dalam penelitian ini juga tercermin pada pemilihan responden atau subjek penelitian. Melibatkan aktor politik dan masyarakat dapat memberikan pandangan dari dua sudut pandang yang berbeda. Ini dapat membantu implikasi penelitian dan membuat temuan lebih relevan dan mengeksplorasi fenomena yang dipelajari. Dengan mengintegritaskan perspektif berbeda, penelitian ini bukan hanya sekedar menyajikan data, tetapi juga menyoang pemahaman yang lebih mendalam tentang komunikasi politik. Yang mana pendekatan ini dapat meningkatkan validitas eksternal dan menghasilkan pengetahuan yang lebih robust, memberikan kontribusi signifikan pada litelatur dan memotivasi perkembangan penelitian lebih lanjut.

